



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 475.5/Kep.581-Hukham/2020

TENTANG

KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) serta pemulihan dan transformasi ekonomi di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.400-Hukham/2020 dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.371-Hukham/2020;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka kelembagaan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.209-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.241-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat;
- d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.252-Hukham/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat;

- e. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.261-Hukham/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.276-Hukham/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat;
- g. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.291-Hukham/2020 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat;
- h. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.334-Hukham/2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat;
- i. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.400-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat; dan
- j. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.371-Hukham/2020 tentang Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat.

KEDUA : Membentuk Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi; dan
- b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi.

KEEMPAT : Komite Kebijakan membawahi:

- a. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KELIMA : Susunan Personalia dan Uraian Tugas Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf a tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Susunan Personalia dan Uraian Tugas Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Struktur Organisasi Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDELAPAN : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Oktober 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM

Dr.Eni Rohyani, SH., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196502231990122002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 475.5/Kep.581-Hukham/2020  
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2020  
 TENTANG : KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN  
 CORONAVIRUS DISEASE 2019  
 (COVID-19) DAN PEMULIHAN  
 EKONOMI DAERAH PROVINSI  
 JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS  
 KOMITE KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Gubernur Jawa Barat.
- II. Wakil Ketua : 1. Panglima Kodam III/Siliwangi.  
 2. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta.  
 3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
 4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.  
 5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.  
 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.  
 7. Wakil Gubernur Jawa Barat.  
 8. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
- III. Dewan Pakar :
- A. Penanganan Covid-19 : 1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.  
 2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.  
 3. Pandu Riono (Universitas Indonesia).  
 4. Tri Yunis Miko (Universitas Indonesia).  
 5. Imam B. Prasodjo (Universitas Indonesia).  
 6. Arto Yuwono Soeroto (Universitas Padjadjaran).  
 7. Bacht Alisjahbana (Universitas Padjadjaran).  
 8. Ida Parwati (Universitas Padjadjaran).  
 9. Kusnandi Rusmil (Universitas Padjadjaran).  
 10. Erna Giri Rachman (Institut Teknologi Bandung).  
 11. Joko Pamungkas (Institut Pertanian Bogor).  
 12. Yun Amril (Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Jawa Barat).  
 13. Ketua Himpunan Psikolog Indonesia.

14. Usamah Manshur (Tim Akselerasi Pembangunan).
  15. Irdam III/Siliwangi.
  16. Kapoksahli Pangdam III/Siliwangi.
  17. Asep Djunaedi (Pamen Ahli Bidang I/Pengtek dan Lingkungan Hidup Kodam Jaya/Jayakarta).
  18. Ahmad Basar (Pamen Ahli Bidang OMP Kodam Jaya/Jayakarta).
- B. Pemulihan dan Transformasi Ekonomi :
1. MS. Hidayat.
  2. Sarwono Kusumaatmadja.
  3. Paskah Suzetta.
  4. Kusmayanto Kadiman (Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat).
  5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
  6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
  7. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
  8. Iwan Hanafi (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).
  9. Agung Suryamal (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).
  10. Titik Anas (Universitas Padjadjaran).
  11. Arief Anshori (Universitas Padjadjaran).
  12. Deny Willy (Institut Teknologi Bandung).
  13. Didi Turmudzi (Ketua Paguyuban Pasundan).
- IV. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Wakil Ketua Pelaksana :
1. Kepala Staf Kodam III/Siliwangi.
  2. Kepala Staf Kodam Jaya/Jayakarta.
  3. Kepala Staf Kogartap II/Bandung.
  4. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
  5. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
  6. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
  7. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat.
  8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
  9. Herri Hudaya.

10. Dedi Kusnadi Thamim (Dewan Pakar Tim Akselerasi Pembangunan).

VI. Sekretariat : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

## B. URAIAN TUGAS

- I. Ketua : menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Daerah melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
- II. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media; dan  
2. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
- III. Dewan Pakar :
- A. Penanganan Covid-19 : memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penanganan Covid-19.
- B. Pemulihan dan Transformasi Ekonomi : memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Daerah.
- IV. Ketua Pelaksana : 1. mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Daerah; dan  
2. melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Daerah kepada Ketua.
- V. Wakil Ketua Pelaksana : 1. membantu Ketua Pelaksana dalam mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Daerah; dan  
2. mewakili Ketua Pelaksana dalam hal berhalangan.
- VI. Sekretariat : membantu Komite Kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum kesekretariatan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 475.5/Kep.581-Hukham/2020  
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2020  
 TENTANG : KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN  
*CORONAVIRUS DISEASE* 2019  
 (COVID-19) DAN PEMULIHAN  
 EKONOMI DAERAH PROVINSI  
 JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS  
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua Harian : Daud Achmad.
- II. Wakil Ketua Harian : 1. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 3. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 4. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 5. Asisten Operasi Kasdam III/Siliwangi.  
 6. Asisten Operasi Kasdam Jaya/Jayakarta.  
 7. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
 8. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- III. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 3. Juwanda (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan).
- IV. Divisi Penanganan Kesehatan
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Asintel Kasdam III/Siliwangi.  
 2. Asintel Kasdam Jaya/Jayakarta.

3. Kepala Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
4. Waasmin Kogartap II/Bandung.
5. Kabid Dokkes Kepolisian Daerah Jawa Barat.
6. Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat.
7. Kabid Dokkes Kepolisian Metro Jaya.
8. Kepala Bagian Dukungan Operasi Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat.

#### A. Sub Divisi Pengujian

- Koordinator : Sri Pujiyanti (Tim Akselerasi Pembangunan).
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Azzania Fibriani (Institut Teknologi Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Lia Faridah (Laboratorium Parasitologi Universitas Padjadjaran).  
3. Agnes Rengga Indrati (Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin).  
4. Dansat Intel Kogartap II/Bandung.  
5. Dantim 1 Satintel Kogartap II/Bandung.  
6. Dantim 2 Satintel Kogartap II/Bandung.  
7. Dantim 3 Satintel Kogartap II/Bandung.  
8. Beny Syafri (Pabandya Pam Sinteldam III/ Siliwangi).  
9. Della Anshara (Sinteldam Jaya).  
10. Fariz Hadyan (Sinteldam Jaya).  
11. Andika Bayu Herbowo (Sinteldam Jaya).  
12. Ryan Bayusantika Ristandi (Fungsional Dokter Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).  
13. Dwi Suntariyani (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).  
14. Evi Susilawati (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).  
15. Tuti Nurhayati (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).  
16. Maudina Wilwatikta (Sekretariat Tim Akselerasi Pembangunan).  
17. Cindytia Fitriyani Rahardjo (Jabar *Digital Service*).

18. Muhammad Thofhan Hannanto (Jabar *Digital Service*).
19. Syarifatul Ulya (Jabar *Digital Service*).
20. Alfian Pamungkas (Jabar *Digital Service*).

#### B. Sub Divisi Pelacakan Kontak

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Koordinator :

1. Waasintel Kasdam III/Siliwangi.
2. Dandeninteldam III/Siliwangi.
3. Kasiintel Korem 051/Wijayakarta.
4. R. Candra Iriansyah (Kogartap II/Bandung).
5. Dandenintel Kodam Jaya/Jayakarta.
6. Wakil Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat.
7. Wakil Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Metro Jaya.
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Edi Sutardi (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Anggota :

1. Dwi Agustian (Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran).
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
3. Kasubdit 3 Dit Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat.
4. Toni Setiawan (Sinteldam III/Siliwangi).
5. Bambang Suprio (Kogartap II/Bandung).
6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Biondi Sanda Sima (Jabar *Digital Service*).
8. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kasubdit Sosial dan Budaya Dit Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat.
10. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

12. Agus Salim (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
13. Dewi Ambarwati (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
14. Asep Ruhiyani (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
15. Ronald Bessie (Koordinator Data, Kawal Covid-19).
16. Helda (Universitas Indonesia).
17. Uus Sukmara (Sekretaris Asosiasi Dinas Kesehatan).
18. Resty Asmauryanah Armis (Jabar *Digital Service*).
19. Dinna Fitriyana (Jabar *Digital Service*).
20. Adityo Trimurdhani (Jabar *Digital Service*).

### C. Sub Divisi Isolasi

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Koordinator       | : | Ridwansyah Yusuf Achmad (Tim Akselerasi Pembangunan).  |
| Wakil Koordinator | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kesdam Jaya/Jayakarta.</li> <li>2. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih.</li> <li>3. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara.</li> <li>4. Aspers Kasdam III/Siliwangi.</li> </ol>   |
| Anggota           | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soni Achmad Nulhaqim (Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran).</li> <li>2. Kepala Rumah Sakit Tk. II Rumah Sakit M. Ridwan Meuraksa.</li> <li>3. Kaurwat Kogartap II/Bandung.</li> <li>4. Andrik Fahrizal (Pabandya Minintel Sinteldam III/Siliwangi)</li> <li>5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>6. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> </ol> |

7. Kepala Bidang Bina Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Ucu Saifurrohman (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
12. Wina (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

#### D. Sub Divisi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan

- Koordinator : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Kesdam III/Siliwangi.  
2. Irvan Afriandi (Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran).
- Anggota : 1. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Kasubbid Yanmed Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih.  
4. Angga Pambudi Adji (Sinteldam Jaya).  
5. Dandenkes Wilayah Bogor, Garut, dan Cirebon.  
6. Kasi Yankes Kesdam III/Siliwangi.  
7. Yatna Hidayatna (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).  
8. Rita Kartika (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).  
9. Aris Asaat (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).  
10. Yulia Sofiatin (IKM Universitas Padjadjaran).  
11. Azaria Laras (Jabar *Digital Service*).  
12. Nisrina Rohadatul Aisy (Jabar *Digital Service*).  
13. Putry Yuliyanty Wahyuni (Jabar *Digital Service*).

#### E. Sub Divisi Data dan Kajian Epidemiologi

- Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Bony Wiem Lestari (Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran).  
2. Kainfolahadam III/Siliwangi.
- Anggota : 1. Nuning Nuraini (Institut Teknologi Bandung).  
2. Panji Hadisoemarto (Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran).  
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Barat.  
4. Kepala Bidang TIK Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
5. Purnama Magdalena Simanulang (Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).  
6. Rusli.  
7. Kurnia Sari Aisyiah (Jabar *Digital Service*).  
8. Muhammad Aswan Syahputra (Jabar *Digital Service*).  
9. Jamilatuzzahro (Jabar *Digital Service*).  
10. Erlangga Nugraha (Jabar *Digital Service*).  
11. Zidny (Jabar *Digital Service*).

#### V. Divisi Teknologi Informasi

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Asrendam III/Siliwangi.  
2. Kabid Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
3. Kabid Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya.  
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### A. Sub Divisi Infrastruktur Teknologi Informasi, Komunikasi dan Layanan *Hotline*

- Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kasubdit Mulmed Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
3. Kepala Subbagian Pulahjianta Roops Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- Anggota : 1. Pandu Kartika Putra.  
2. Mohammad Tamami (Pabandya Jemen Srendang III/Siliwangi).  
3. Muhammad Muhrizal Hidayat (Jabar *Digital Service*).  
4. Ayi Mutaqin (Jabar *Digital Service*).

#### B. Sub Divisi Pengembangan Aplikasi

- Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah PLDDIG Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Kepala Seksi Aplikasi dan Data Digital Unit Pelaksana Teknis Daerah PLDDIG Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Layanan Digital dan Informasi Unit Pelaksana Teknis Daerah PLDDIG Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Afid Cahyono (Pabandya Anev dan Dalprog Srendam III/Siliwangi).  
3. Yoga Hanggara (Jabar *Digital Service*).  
4. Rian Andrian (Jabar *Digital Service*).  
5. Rizal Pahlevi (Jabar *Digital Service*).

#### C. Sub Divisi Relawan

- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.  
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan.  
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.  
4. Waasrendam III/Siliwangi.  
5. Ramram Mukhlis Ramdani.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Alexander Randika Pratama (Jabar *Digital Service*).
14. Dewi Arum Melati (Jabar *Digital Service*).
15. Rizi Advista Permana (Jabar *Digital Service*).
16. Dadang Sudarja (Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat).
17. Sandi Rahmat (Relawan Aparatur Negara Jawa Barat).
18. Wimpy (*Atlas Medical Pioneer* Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran).
19. Khoirul Anam Gumilar Winata (Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat).
20. *Liaison Officer* Satuan Tugas Covid-19 (ditetapkan tersendiri).
21. Kasiren Rem 051/Wijayakarta.
22. Kasilog Kogartap II/Bandung.
23. Kaur Prot VIP Kogartap II/Bandung.
24. Pasimin Subkogartap 0609/Cimahi.
25. Wadir Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat.
26. Wadir Intelkam Kepolisian Daerah Metro Jaya.
27. Harlansyah (Pabandya Puanter Sterdam III/Siliwangi).
28. Widi Hidayat (Pabandya Ren Sopsdam III/Siliwangi).

## VI. Divisi Kerja Sama, Logistik dan Bantuan Sosial

- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Aster Kasdam III/Siliwangi.  
3. Asmin Kogartap II/Bandung.  
4. Dir Binmas Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
5. Dir Binmas Kepolisian Daerah Metro Jaya.

### A. Sub Divisi Logistik

- Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Aslog Kasdam III/Siliwangi.
- Anggota : 1. Kepala Badan Urusan Logistik Jawa Barat.  
2. Wahyu Nugroho (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan).  
3. Kepala Biro Logistik Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
4. Achmad Priadi (Pabandya Bekang Slogdam III/Siliwangi).  
5. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung.  
6. Kepala Regional 5 PT. Pos Indonesia.  
7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
8. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
9. Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
10. Aldy Rialdy (Jabar *Digital Service*).  
11. Dyana C. Jatnika (Jabar *Digital Service*).  
12. Rizki Adam (Jabar *Digital Service*).  
13. Randy Kusumaatmadja.

### B. Sub Divisi Kerja Sama

- Koordinator : Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bagian Pal Ro Logistik Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
2. Waaslog Kasdam III/Siliwangi.
- Anggota : 1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.  
2. Ferdhiman P. Bariguna A. R. (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan).  
3. Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
4. Kaka Suminta.  
5. Kevin Samsi (Tim Penasihat Investasi Jawa Barat).  
6. Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
7. Firman Anggriawan (*Jabar Digital Service*).  
8. Isti Hartini (*Jabar Digital Service*).

#### C. Sub Divisi Bantuan Sosial

- Koordinator : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Waaster Kasdam III/Siliwangi.  
3. Rizki Rusdiwijaya (*Jabar Digital Service*).
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Seksi Barang Pokok dan Barang Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Himawan Ady Sutanto (Pabandya Bakti TNI Sterdam III/Siliwangi).  
4. Direktur Utama PT. Agro Jabar.  
5. Aldy Ginanjar (*Jabar Digital Service*).  
6. Ibrahim Ukrin (*Jabar Digital Service*).  
7. Muhammad Insan Al-Amin (*Jabar Digital Service*).

## VII. Divisi Komunikasi Publik, Perubahan Perilaku dan Penegakan Aturan

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Kapendam III/Siliwangi.  
4. Dir Samapta Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
5. Dir Samapta Kepolisian Daerah Metro Jaya.

## A. Sub Divisi Komunikasi Publik

- Koordinator : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bagian Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kapen Kodam III/Siliwangi.  
3. Lia Endiani (Tim Akselerasi Pembangunan).
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pelayanan Media Informasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Kepala Subbagian Publikasi Peliputan dan Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
4. Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
5. Santi Indra Astuti (Universitas Islam Bandung).  
6. Suhendrik (Jabar Express).  
7. Nea Maryami Nintyas (Jabar *Digital Service*).  
8. Aulia Rifqiandono (Jabar *Digital Service*).  
9. Rizky Ananda (Jabar *Digital Service*).

## B. Sub Divisi Promosi Kesehatan

- Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.  
2. Asops Kogartap II/Bandung.  
3. Kasipers Korem 051/Wijayakarta.  
4. Waaspers Kasdam III/Siliwangi.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Chitra Ratna Septryandica (*Inclusive Indonesia*).
5. Samuel Oktora Batarede.
6. Firman Mustari.
7. Mikail Andrew (*Jabar Digital Service*).
8. Edwina Narulita Sari Agustin (*Jabar Digital Service*).
9. Aldy Nur Febrian (*Jabar Digital Service*).
10. Pasipers Rem 051/Wijayakarta.
11. Rudi Aritonang (Kogartap II/Bandung).
12. Kasubkogartap 0606/Bogor.
13. Kasubkogartap 0618/Berdiri Sendiri (Kota Bandung).
14. Kasubkogartap 0623/Cilegon.
15. Kasubkogartap 0609/Cimahi.
16. Kasubkogartap 0612/Tasikmalaya.
17. Kasubkogartap 0614/Cirebon.
18. Afri Swandi Ritonga (Pabandya Lat Sopsdam III/Siliwangi).

C. Sub Divisi Pencegahan, Pemakaman, Operasi Lapangan dan Penegakan Aturan

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Koordinator : 1. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kasiops Rem 051/Wijayakarta.

3. Waasops Kogartap II/Bandung.

4. Danpomdam III/Siliwangi.

5. Kabintaldam III/Siliwangi.

6. Waasops Kasdam III/Siliwangi.

Anggota : 1. Dandenpom Kogartap II/Bandung.

2. Ditpamobvit Kepolisian Daerah Jawa Barat.

3. Dirlantas Kepolisian Daerah Jawa Barat.

4. Danlanud Husein Sastranegara.

5. Danlanud Sulaiman Bandung.

6. Danlanud Atang Sanjaya Bogor.

7. Danlanud Suryadarma Kalijati Subang.

8. Danlanud Sugiri Sukatami Majalengka.
9. Danlanud Penggung Cirebon.
10. Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya.
11. Asintel Kopashas TNI Angkatan Udara Bandung.
12. Dandenma Kopashas TNI Angkatan Udara Bandung.
13. Danlanal Bandung.
14. Agus Muchtadi (Pabandya Ops Sopsdam III/Siliwangi).
15. Muhidin (Pabandya Watpers Spendam III/Siliwangi).
16. Kasi Idik Pomdam III/Siliwangi.
17. Ketua Jabar *Quick Response*.
18. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
20. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
22. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
23. Kepala Bidang Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
24. Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
25. Kepala Bidang Transportasi Udara Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
26. Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
27. Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Denda Alamsyah.
29. Fanny Prina (Jabar *Digital Service*).
30. Pasiops Rem 051/Wijayakarta.
31. Wadandenpom Kogartap II/Bandung.
32. Pasi Idik Denpom Kogartap II/Bandung.
33. Kepala Pemakaman Kogartap II/Bandung.

## VII. Divisi Akuntabilitas, Administrasi dan Pelaporan

- Ketua : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Inspektur Provinsi Jawa Barat.  
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 3. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.  
 4. Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.  
 5. Kepala Bagian Dalops Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
 6. Kepala Bagian Dalops Kepolisian Daerah Metro Jaya.  
 7. Kepala Bagian Dukungan Operasi Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat.

### A. Tim Teknis

#### 1. Tim Teknis I

- Ketua : Korwas Bidang IPP 2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Korwas Bidang APD 1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.  
 2. Korwas Bidang APD 2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.  
 3. Korwas Bidang P3A Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.  
 4. Amrival Wahyuhaidari (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).  
 5. Tuti Susilawati (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).  
 6. Korwas Bidang AN 1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.  
 7. Korwas Bidang AN 2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.  
 8. Iwan Herawan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).

9. Korwas Bidang IPP 1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
10. Burhan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
11. Enan Sugandi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
12. Korwas Bidang Investigasi 1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
13. Korwas Bidang Investigasi 2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
14. Ahmad Fauzi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).

2. Tim Teknis II :

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Anggota :

1. Kepala Subbagian Kepegawaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Dodi Kusmayadi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
3. Sri Rahayu (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
4. Dedi Effendi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
5. Aneu Kamalia (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
6. Kepala Subbagian Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
7. Dedi Memed (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
8. Rini Anggraeni (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
9. Suniarti (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
10. Yayat Ruhyat (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
11. Wikanda (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
12. Aep Dudung (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
13. Asep Tajudin (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).

14. Asep Taswijan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
15. Juna Sudrajat (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
16. Sumarna (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
17. Deni (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
18. Kepala Subbagian Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
19. Asep Sopyan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
20. Risang Anggara (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
21. Krisna Yuliana Setiadewi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).

#### B. Sub Divisi Administrasi dan Pelaporan

- Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Suryadi (Irutben Itdam III/Siliwangi).
- Anggota : 1. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Subbagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### C. Sub Divisi Anggaran dan Keuangan

- Koordinator : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Barat.  
2. Santi Sopandi (SIPD).

#### D. Sub Divisi Percepatan Pembiayaan dan Pengadaan

- Koordinator : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Kepala Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Barat.  
 2. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 3. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 4. Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.  
 5. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.  
 6. Kepala Sub Seksi D1 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.  
 7. Supriyatna (Kepolisian Daerah Jawa Barat).  
 8. Ahmad Sutrisno (Kepolisian Daerah Jawa Barat).  
 9. Rayum Sonia Kuswardhani.  
 10. Rohmat Hidayat (Jabar *Digital Service*).  
 11. Grian Hendra Oktiana (Jabar *Digital Service*).

#### E. Sub Divisi Monitoring dan Evaluasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## B. URAIAN TUGAS

- I. Ketua Harian : 1. menetapkan rencana operasional penanganan Covid-19;  
2. mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan Covid-19;  
3. melakukan pengawasan penanganan Covid-19;  
4. mengerahkan sumber daya untuk penanganan Covid-19; dan  
5. melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 kepada Ketua Komite Kebijakan.
- II. Wakil Ketua Harian : 1. membantu Ketua Harian dalam pelaksanaan tugasnya; dan  
2. mewakili Ketua Harian dalam hal Ketua Harian berhalangan.
- III. Sekretaris : 1. memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;  
2. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan  
3. memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam melaksanakan aktivitasnya.
- IV. Divisi Penanganan Kesehatan : a. menyelenggarakan pengujian;  
b. menyelenggarakan pelacakan kontak;  
c. menyelenggarakan isolasi;  
d. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kesehatan;  
e. menyelenggarakan pengelolaan data dan kajian epidemiologi;  
f. memastikan koordinasi dan tindak lanjut setiap Sub Divisi sesuai dengan alur yang ditetapkan; dan  
g. memastikan ketersediaan data yang *reliable* pada seluruh penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan.
- A. Sub Divisi Pengujian : 1. melaksanakan dan mengoordinasikan pengujian Covid-19 di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan laboratorium satelit di Jawa Barat;  
2. mengoordinasikan laboratorium pengujian;  
3. mengelola pengujian massal, termasuk pengalokasian logistik pengujian serta pengawasan implementasi pengujian massal secara rutin;  
4. memastikan pengujian dapat mencapai atau melebihi target mingguan WHO secara konsisten;

5. memastikan pengujian dapat diakses secara inklusif dan mudah;
6. memastikan hasil pengujian dapat diketahui oleh *stakeholders* yang berwenang dengan cepat dan tepat;
7. mengoordinasikan pengumpulan data yang *reliable* dan tepat waktu mengenai hasil pelaksanaan pengujian dari fasilitas pengujian maupun laboratorium pengujian di Jawa Barat; dan
8. memastikan pengujian dialokasikan dengan tepat sasaran, termasuk untuk masyarakat umum dengan tingkat risiko paparan tinggi dan bergejala serta mendaftarkan diri melalui Pikobar, suspek, dan tenaga kesehatan.

- B. Sub Divisi Pelacakan Kontak :
1. melakukan pemantauan surveilans/pelacakan kontak secara menyeluruh di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit);
  2. mengoordinasikan pengumpulan data yang *reliable* dan tepat waktu mengenai hasil pelacakan kontak dari fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Barat;
  3. melakukan kegiatan surveilans/pelacakan kontak secara agresif untuk memenuhi *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan secara cepat, tepat, dan konsisten;
  4. mengoordinasikan kuantitas sumber daya untuk proses pelacakan kontak baik alat dan sumber daya manusia;
  5. mengoordinasikan standardisasi prosedur dan target surveilans/pelacakan kontak serta kompetensi tim surveilans/pelacakan kontak; dan
  6. melakukan pengawasan pasien demam/*Influenza Like Illness*/pneumonia.
- C. Sub Divisi Isolasi :
1. mencari dan menyediakan tempat perawatan penduduk terpapar Covid-19 berupa ruang isolasi baru dan tempat karantina sesuai standar *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan;
  2. melakukan pemantauan dan memastikan semua pasien Covid-19 melakukan isolasi dan karantina;
  3. menyediakan data yang *reliable* mengenai hasil pemantauan isolasi dan karantina pasien secara harian;
  4. memastikan kapasitas ruang isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan; dan
  5. mengoordinasikan pengumpulan data yang *reliable* dan tepat waktu terkait isolasi pasien Covid-19.

- D. Sub Divisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan : 1. mengoordinasikan rumah sakit rujukan;  
 2. menyediakan data yang *reliable* mengenai jumlah dan detail fasilitas, pasien, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun fasilitas isolasi sementara;  
 3. mengoordinasikan fasilitas pelayanan kesehatan pra-rujukan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;  
 4. mengoordinasikan dan memantau kondisi sumber daya manusia kesehatan;  
 5. memastikan ketersediaan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bertugas dalam penanganan Covid-19 sesuai standar dan kuantitas yang mencukupi;  
 6. memastikan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar dan kuantitas yang mencukupi;  
 7. memastikan penurunan jumlah kematian dari kasus Covid-19 dan *case fatality rate* sesuai standar *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan;  
 8. memastikan persentase kumulatif kasus sembuh dari seluruh kasus terkonfirmasi sesuai standar *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan; dan  
 9. memantau jumlah tenaga kesehatan yang terkonfirmasi tidak melebihi standar *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan.
- E. Sub Divisi Data dan Kajian Epidemiologi : 1. menyelenggarakan kajian epidemiologi;  
 2. menyelenggarakan kajian tahapan penanganan wabah;  
 3. mengelola data, pemodelan, dan visualisasi kesehatan masyarakat;  
 4. mengoordinasikan dan melaksanakan proses integrasi sistem internal maupun sistem yang dikembangkan pemerintah pusat dan kabupaten/kota;  
 5. melakukan pemetaan kelompok risiko tinggi (*vulnerable*);  
 6. menyediakan informasi terkait nilai Rt, tren jumlah kasus (dalam periode tertentu) dan/atau variabel lain yang berperan dalam evaluasi;  
 7. mengevaluasi kebutuhan data dalam pengelolaan, pemodelan, visualisasi kajian epidemiologi dan penanganan wabah;  
 8. mengoordinasikan sinkronisasi data dari aplikasi pelaporan kasus dan manual agregat yang telah dikumpulkan;  
 9. mengoordinasikan sinkronisasi data Pikobar dengan data di *website* kabupaten/kota; dan

10. membuat usulan rekomendasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan terkait penanganan Covid-19.
- V. Divisi Teknologi Informasi
- a. memastikan kesesuaian data *website* di kabupaten/kota;
  - b. melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, komunikasi dan *hotline*;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi; dan
  - d. memastikan ketersediaan data yang *reliable* pada seluruh penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan.
- A. Sub Divisi Infrastruktur Teknologi Informasi, Komunikasi dan Layanan *Hotline*
- 1. mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19; dan
  - 2. melakukan pengelolaan/operasional *Jabar Command Center* sebagai Pusat Komando Pikobar untuk monitoring perkembangan yang menangani.
- B. Sub Divisi Pengembangan Aplikasi
- 1. melakukan riset dan analisis terhadap teknologi potensial yang mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19; dan
  - 2. mengimplementasikan prototipe menjadi aplikasi/produk informatika lain yang mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19.
- C. Sub Divisi Relawan
- 1. mengoordinasikan sumber daya aparatur, untuk melakukan pendampingan, pengumpulan, dan pelaporan data dalam penanganan Covid-19 di kabupaten/kota;
  - 2. mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan Covid-19;
  - 3. mengoordinasikan penempatan relawan dengan Divisi lainnya dalam pelaksanaan tugas kerelawanan di tingkat provinsi;
  - 4. melakukan manajemen pengelolaan relawan untuk memastikan dapat terpenuhinya hak dan kewajiban relawan selama menjalankan tugas kerelawanan; dan
  - 5. melakukan pendampingan dan pelatihan dasar kepada relawan mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19 serta penjelasan tugas pokok dan fungsi relawan.
- VI. Divisi Kerja Sama, Logistik dan Bantuan Sosial
- a. menyelenggarakan pengelolaan logistik;
  - b. menyelenggarakan kerja sama;
  - c. menyelenggarakan jaring pengaman sosial; dan
  - d. memastikan ketersediaan data yang *reliable* pada seluruh penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan.

- A. Sub Divisi Logistik : 1. melaksanakan manajemen logistik kesehatan, meliputi alat pelindung diri, alat kesehatan, obat-obatan dan sediaan farmasi lainnya;
2. melaksanakan manajemen logistik non kesehatan, berupa kebutuhan pokok masyarakat;
3. melakukan monitoring penerimaan dan penyaluran logistik kesehatan dan non kesehatan dari gudang ke penerima barang; dan
4. melakukan pencatatan dan pelaporan terkait jumlah ketersediaan dari hasil penerimaan dan penyaluran logistik kesehatan dan non kesehatan.
- B. Sub Divisi Kerja Sama : 1. melakukan kegiatan usaha promosi penggalangan bantuan baik tunai maupun non-tunai dari masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga lainnya;
2. melakukan konsolidasi dan kerja sama dengan berbagai organisasi strategis sebagai mitra dalam percepatan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat;
3. melakukan koordinasi dengan Sub Divisi Logistik mengenai penerimaan bantuan untuk pendataan dan penyaluran ke gudang; dan
4. melakukan pencatatan dan pelaporan terkait bantuan tunai maupun non tunai yang diterima dari donatur.
- C. Sub Divisi Bantuan Sosial : 1. melakukan koordinasi jaring pengaman sosial untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19;
2. melakukan pemetaan penerima bantuan berdasarkan pintu/jenis bantuan sosial;
3. memberikan bantuan nutrisi pada kelompok masyarakat rentan;
4. melakukan monitoring distribusi penyaluran bantuan sosial; dan
5. menyediakan data yang *reliable* terkait jumlah penerima dan jumlah penyaluran bantuan sosial.
- VII. Divisi Komunikasi Publik, Perubahan Perilaku dan Penegakan Aturan : 1. melakukan kegiatan edukasi terkait penegakan protokol kesehatan secara langsung kepada masyarakat;
2. mengoordinasikan pelaksanaan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 di berbagai sektor area;
3. menyelenggarakan operasi lapangan dan penegakan aturan;
4. menyelenggarakan pemberdayaan aparatur dan masyarakat; dan

5. memastikan ketersediaan data yang *reliable* pada seluruh penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan.
- A. Sub Divisi Komunikasi Publik : 1. melaksanakan diseminasi komunikasi publik mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
2. menyusun konten publikasi dan edukasi pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada masyarakat melalui media *online*, cetak maupun luar ruang;
3. melakukan klarifikasi berita *hoax* mengenai Covid-19;
4. mengintegrasikan informasi dan publikasi mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui kanal resmi, media sosial dan *website* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk Pikobar;
5. melakukan edukasi dan publikasi pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat; dan
6. mengoordinasikan pelaksanaan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 di berbagai sektor area, baik di fasilitas pendidikan, bisnis, perkantoran, pelayanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.
- B. Sub Divisi Promosi Kesehatan : 1. melakukan kegiatan edukasi terkait penegakan protokol kesehatan, pencegahan penyebaran Covid-19 dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara sistematis, masif, dan konsisten dengan pendekatan yang menyeluruh dan bervariasi;
2. mengoordinasikan pelaksanaan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 di berbagai sektor area, baik di fasilitas pendidikan, bisnis, perkantoran, pelayanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya; dan
3. bekerjasama dengan Sub Divisi Relawan dalam aktivasi simpul-simpul masyarakat dan relawan untuk membantu meningkatkan edukasi pencegahan penularan Covid-19 dan promosi kesehatan.
- C. Sub Divisi Pencegahan, Pemakaman, Operasi Lapangan, dan Penegakan Aturan : 1. melaksanakan pengawasan massa pada acara publik;
2. melaksanakan pengendalian dan pengamanan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru di ruang publik;
3. melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak secara rutin, masif, dan sistematis;

4. mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan teknologi, termasuk dalam monitoring *Closed Circuit Television* (CCTV), untuk melakukan pengawasan penegakan protokol kesehatan;
5. penegakan aturan menjaga jarak aman (*physical distancing*);
6. mengawasi keterisian penumpang pada kendaraan publik dan kendaraan pribadi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal;
7. melaksanakan pengendalian dan pengamanan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru di ruang publik;
8. melakukan monitoring dan upaya pengendalian agar tempat publik yang masih beroperasi melakukan skrining demam/gejala klinis terhadap pengunjung;
9. melakukan monitoring dan upaya pengendalian agar tempat publik yang masih beroperasi melakukan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
10. melakukan monitoring dan upaya pengendalian agar tempat publik yang masih beroperasi melakukan desinfeksi secara reguler;
11. melakukan monitoring dan upaya pengendalian agar tempat publik yang masih beroperasi menyediakan layanan antar atau bekerjasama dengan pihak lain untuk memungkinkan layanan dimaksud;
12. melakukan pengawasan di gerbang-gerbang masuk vital, seperti pelabuhan, bandara, atau gerbang batas antar Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Provinsi lain;
13. melakukan monitoring dan upaya pengendalian saat kebijakan pembatasan sosial berlaku, agar tempat publik non-esensial tidak beroperasi atau melakukan pekerjaan secara jarak jauh; dan
14. mencari dan menyediakan tempat pemakaman penduduk yang meninggal akibat Covid-19.

- VIII. Divisi Akuntabilitas, Administrasi dan Pelaporan : 1. menyelenggarakan pengawasan dan akuntabilitas;
2. menyelenggarakan anggaran dan keuangan;
  3. menyelenggarakan percepatan pembiayaan dan pengadaan; dan
  4. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi.

- A. Tim Teknis : 1. melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah untuk penanganan Covid-19;
2. melaksanakan penanganan Covid-19 melalui sinergi antar Divisi dan meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19; dan
3. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional serta meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan melaksanakan penanganan Covid-19.
1. Tim Teknis I : 1. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan intern berupa pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dalam penanganan Covid-19 kepada Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
2. memetakan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19.
2. Tim Teknis II : menyusun dan mengimplementasikan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19.
- B. Sub Divisi Administrasi dan Pelaporan : 1. melakukan percepatan pengadministrasian penanganan Covid-19; dan
2. menyusun laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- C. Sub Divisi Anggaran dan Keuangan : 1. melakukan percepatan pengalokasian anggaran dan keuangan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
2. memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan Covid-19 terutama untuk kegiatan *test, trace* dan *treatment* serta kampanye 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak).
- D. Sub Divisi Percepatan Pembiayaan dan Pengadaan : melakukan percepatan pembiayaan dan pengadaan barang kebutuhan penanganan Covid-19.

E. Sub Divisi Monitoring dan Evaluasi : melakukan monitoring dan evaluasi penanganan Covid-19.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 475.5/Kep.581-Hukham/2020  
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2020  
 TENTANG : KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN  
 CORONAVIRUS DISEASE 2019  
 (COVID-19) DAN PEMULIHAN  
 EKONOMI DAERAH PROVINSI  
 JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS  
 SATUAN TUGAS PEMULIHAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH  
 PROVINSI JAWA BARAT

## A. SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua Harian : Ipong Witono (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).
- II. Wakil Ketua Harian : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 3. Jajat Priatna (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).  
 4. Herman Muchtar (Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat).  
 5. Ina Primiana (Universitas Padjadjaran).  
 6. Arfi Rafnialdi (Tim Akselerasi Pembangunan).
- III. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Sekretaris : 1. Maman RHW (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).  
 2. Surya Batara Kartika (Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat).  
 3. Elpi Nazmuzzaman (Tim Akselerasi Pembangunan).  
 4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## V. Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Sonson Garsoni (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).  
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 4. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 5. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Rochadi Tawaf (Akademisi).  
 2. Yudi Azis (Praktisi).  
 3. Irwan Subrata (GP Perkebunan Jawa Barat).  
 4. Irwan Y. Lubis (Praktisi Ketahanan Pangan).  
 5. Waryo Sahru (Presidium Nasional Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia).  
 6. Yudi N. Ihsan (Fakultas Perikanan Universitas Padjadjaran).  
 7. Tualar Simarmata (Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran).  
 8. Entang Sastraatmaja (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat).  
 9. Hariyanto (PT. Perkebunan Nusantara VIII).  
 10. Dicky Yuana Rady (Perhutani Divre Jawa Barat-Banten).  
 11. Totty Darlina (Pengusaha Umbi).  
 12. Tri Bagus Santoso (Konsultan Perkebunan/ DPD Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor).  
 13. Hadiyan Nur Sofiyan (Kiosayur/Aktivis Petani).

## VI. Divisi Manufaktur, Luar Negeri dan Tenaga Kerja

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Ade Sudradjat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia).  
 2. Dedi Wijaya (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).

#### A. Sub Divisi Manufaktur

- Koordinator : Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Rizal Tanzil Rakhman (Asosiasi Pertekstilan Indonesia).
- Anggota :
  1. Budiman Wiryaatmaja (Asosiasi Rajut Datar Bandung/Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Tekstil dan Produk Tekstil).
  2. Sugih Wiramikarta (Asosiasi Pengerjaan Logam dan Permesinan Jawa Barat).
  3. Roni Lukito (Garmen Eiger).
  4. Yayat S. Andhie (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia Jawa Barat).
  5. Benny Woenardi (Direktur Utama Jababeka *Dry Port*).
  6. Chandra Setiawan (API Jabar).

#### B. Sub Divisi Bidang Luar Negeri dan Tenaga Kerja

- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator :
  1. Rosyid Hoewel (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
  2. Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
  1. Ketua Ikatan Eksportir Importir.
  2. Soegianto (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
  3. Rudi Martono (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
  4. Asep Hendra Maulana (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
  5. Rosa Haryani Setiawati (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
  6. Abdul Syukur (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat).
  7. Baharuddin Simbolon (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Jawa Barat).

8. Eddy Sugiri (*Honorary Consul* Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Austria dan Hongaria).
9. Abdul Sobur (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia).
10. Martin B. Chandra (APINDO).

## VII. Divisi Pariwisata, Telekomunikasi, dan Transportasi

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua : 1. Faisal Kasim (Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung).  
2. Januar P. Ruswita (Serikat Perusahaan Pers).  
3. Aldo Fantinus Wiyana (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).

### A. Sub Divisi Pariwisata

Koordinator : Kepala Biro BUMD dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Koordinator : Dede Koswara (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran Seluruh Indonesia Jawa Barat).

Anggota : 1. Heri Hermani (Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Jawa Barat).  
2. Perry Tristiano (Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Jawa Barat).  
3. Djoni Syofyan Iskandar (Dewan Pengurus Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Jawa Barat).  
4. Deni Nurdiana (PT. Jaswita).  
5. Herman Rukmanadi (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Jawa Barat).  
6. Budijanto Ardiansjah (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Jawa Barat).  
7. Farid Patria (Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat).  
8. Taufik Hidayat Udjo (Pegiat Seni).  
9. Derry Septiadi (Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia).  
10. Pindi Setiawan (Institut Teknologi Bandung).

11. Agus Mashudi (Perum Perhutani).
12. Bobby Renaldi (Dewan Pimpinan Daerah *Indonesian Hotel General Manager Association* Jawa Barat).
13. Neneng Djuraidah (Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkatan Darat Jawa Barat).

#### B. Sub Divisi Telekomunikasi, Media dan Informatika

- Koordinator : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : M. Ilimi Hatta (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat).
- Anggota : 1. Wan Abas (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Barat).  
 2. Rahim Asyik (Asosiasi Media Siber Indonesia).  
 3. Yanto S. Utomo (Serikat Perusahaan Pers Jawa Barat).  
 4. Erik Palupi (Media Monitoring dan Data *Analytic*).  
 5. Boris Syaifullah (Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi Jawa Barat).  
 6. Dwi Purnomo (Universitas Padjadjaran/*Praktisi Sociopreneur-Technopreneur*).

#### C. Sub Divisi Transportasi dan Logistik

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat  
 2. R. Budi Setiawan (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia).
- Anggota : 1. Salahudin Rafi (Direktur Utama PT. BIJB).  
 2. Widya Wibawa (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia).  
 3. Wayan Wardhana (Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia).  
 4. Yudi Saputra (Asosiasi Logistik dan *Forwarder* Indonesia).

5. Ifan Nurmufidin (Organisasi Angkutan Darat).
6. Riana Indriana (Organisasi Angkutan Darat).
7. Nur Budi Mulyono (Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung).
8. Rein Wirawan Gazalba (PT. Kereta Api Indonesia).
9. Tessa Adelina Karim (PT. Garuda Indonesia).

#### VIII. Divisi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif

Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua : 1. Mahpudi (Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Barat).  
 2. Jodi Jantira (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat).  
 3. Dwinita Larasati (*Indonesia Creative Cities Network*).

##### A. Sub Divisi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Koordinator : Helma Agustawan (*Network Emulator*).

Anggota : 1. Rieta Rossita Dewi (Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil).  
 2. Meriza Hendri (Perkumpulan *Academic, Business, Community, Government, and Media*).  
 3. Ida Hindarsah (*Founders Talent*).  
 4. Rio Febrian Wilantara (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jawa Barat).  
 5. Arya Aristokrat (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jawa Barat).  
 6. Ahkam Nasution (Pegiat Koperasi dan *Startup*).  
 7. Siti Nur Maftuhah (Asosiasi *Business Development Services* Indonesia Jawa Barat).  
 8. Adyesa Kevindra Albari (Bandung *Initiative Movement* Jawa Barat).  
 9. Grahadea Kusuf (*Startup* Bandung).  
 10. Sutandi Triputra S. (Pegiat *Startup* Teknologi).  
 11. Wawan Nurdien (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat).

12.Reza Arfah (Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat).

13.Putih Aljihadi (Komunitas Berdikari Indonesia).

#### B. Sub Divisi Ekonomi Kreatif

Koordinator : Gugun Gunardi (Forum Penulis dan Editor Jawa Barat).

Wakil Koordinator : Adhi Nugraha (Institut Teknologi Bandung).

Anggota :

1. Dedy Firmansyah (Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia Jawa Barat).
2. Marnawi Munamah (Forum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah *Digital* Kreatif Indonesia).
3. Suhastin Santyati (Sekretaris Forum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah *Digital* Kreatif Indonesia).
4. Elina Farida Eksan (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia).
5. Anton Dwinanto (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia).
6. Hedy Yamasari (Asosiasi Eksportir dan Produsen *Handicraft* Indonesia Jawa Barat).
7. R. Nina Hermina Kamil (Asosiasi Eksportir dan Produsen *Handicraft* Indonesia Jawa Barat).
8. M. Yudi W. (Asosiasi Eksportir dan Produsen *Handicraft* Indonesia Jawa Barat).
9. M. Adi Panuntun (Sembilan Matahari, Bandung *Creative City Forum*).
10. Raditya Ardianto (Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia).
11. Arianti Ayu Puspita (*Design Ethnography Lab* Institut Teknologi Bandung).
12. Rema K. Sunendar (Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Barat).
13. Agustina Rozali (Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Barat).

#### VIII Divisi Konstruksi dan Properti

Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua :

1. Ahmad Hanafiah (Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Nasional Indonesia Pusat).
2. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Joko Suranto (Ketua Dewan Pengurus Daerah *Real Estate* Indonesia Jawa Barat).

#### A. Sub Divisi Properti

- Koordinator : Hari Raharja (*Real Estate* Indonesia Jawa Barat).
- Wakil Koordinator : Jajang Suteja Himpera (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat).
- Anggota : 1. Gunawan Sumadilaga (Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia).  
 2. Chandra Tambayong (Pengembang Kawasan Niaga).  
 3. Ryan Brasali (Pengembang Kawasan Kota).  
 4. Kusnadi (Pengembang Hunian Menengah).  
 5. Rayhan Nuradithya Wicaksono (Asosiasi Pengembang Indonesia).  
 6. Heryawan S. K. (Pengembang Kawasan Wisata).

#### B. Sub Divisi Konstruksi

- Koordinator : Susilo Wibowo (Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Nasional Indonesia).
- Wakil Koordinator : Andrian Tejakusuma (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).
- Anggota : 1. Rudi Rakian (Rantai Pasok Konstruksi).  
 2. Darsono (Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia).  
 3. Yanyan Indrayana (Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia).  
 4. Ismet Slamet (Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Nasional Indonesia).  
 5. TB. Nasrul Ibnu H. R. (Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia).  
 6. Asep Slamet (Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia).  
 7. Rudi Achmad Natsir Tuasikal (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia).  
 8. Ali Abudan (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia).

## IX. Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan

- Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional II Jawa Barat.  
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.  
4. Direktur Utama Bank BJB.  
5. Acuviarta Kartabi (Universitas Pasundan).

## A. Sub Divisi Kajian Ekonomi

- Koordinator : Kepala Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Provinsi Jawa Barat.  
2. Yayasan Satyakti (Universitas Padjadjaran).  
3. Diding Sakri (Tim Akselerasi Pembangunan).
- Anggota : 1. *Head Department of Economics* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.  
2. Horas Djulius (Univeristas Pasundan).  
3. Pradono (Institut Teknologi Bandung).  
4. M. Fani Cahyandito (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung).  
5. Lina Aulina (Universitas Padjadjaran).  
6. Ronald Bessie (Institut Teknologi Bandung).

## B. Sub Divisi Jasa Keuangan

- Koordinator : Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Zaenal Aripin (Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat).
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.  
2. Kepala *Group Advisory* Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.  
3. Dini Rosdini (Universitas Padjadjaran).

4. Farida Titik Kristianti (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom).
5. Mohammad Anwar (Universitas Padjadjaran).
6. Nanny Dewi (Universitas Padjadjaran).
7. Jaja Suteja (Universitas Pasundan).
8. Eggi Hamzah (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).
9. Tubagus Raditya (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat).

#### X. Divisi Komunikasi dan Gerakan

Ketua : Eric Wiradipoetra (Praktisi Desain Komunikasi Visual).

Wakil Ketua : 1. Aat Soeratin (Rumah Nusantara).  
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

##### A. Sub Divisi Komunikasi

Koordinator : Muhammad Bumidia (Praktisi Desain Komunikasi Visual).

Wakil Koordinator : 1. Refa Riana (Jurnalis).  
2. Fauzan Kemal Akbar (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat).  
3. Dicky Wahyu (Praktisi Desain Komunikasi Visual).

##### B. Sub Divisi Gerakan

Koordinator : Imam Nur Adi (*Event Management*).

Wakil Koordinator : 1. Hanief Muhamad (PT. Jaswita).  
2. Rifqi Firmansyah (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat).  
3. Feby Elvany Pangestika (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat).

## B. URAIAN TUGAS

- I. Ketua Harian : a. menyusun kebijakan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai dampak pandemi Covid-19;  
b. menyusun skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan  
c. memimpin, mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- II. Wakil Ketua Harian : a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;  
b. membantu Ketua dalam menyusun kebijakan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai dampak pandemi Covid-19;  
c. membantu Ketua dalam menyusun skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan  
d. mewakili Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, dalam hal berhalangan.
- III. Sekretaris : a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;  
b. memfasilitasi kesekretariatan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi; dan  
c. menyusun bahan pertimbangan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai dampak pandemi Covid-19.
- IV. Wakil Sekretaris : a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan  
b. mewakili Sekretaris dalam hal berhalangan.
- V. Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi, serta pertanian dan ketahanan pangan masyarakat;  
b. merancang pembangunan, pertanian dan ketahanan pangan berbasis potensi lokal; dan  
c. membangun kemitraan multipihak di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

- VI. Divisi Manufaktur, Luar Negeri dan Tenaga Kerja :
- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang manufaktur; dan
  - b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi melalui jejaring internasional.
- A. Sub Divisi Manufaktur :
1. merancang pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif; dan
  2. membangun kemitraan multipihak di bidang manufaktur.
- B. Sub Divisi Bidang Luar Negeri dan Tenaga Kerja :
1. merancang pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
  2. membangun kemitraan multipihak di luar negeri.
- VII. Divisi Pariwisata, Telekomunikasi dan Transportasi :
- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang pariwisata;
  - b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang industri media; dan
  - c. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang transportasi dan logistik.
- A. Sub Divisi Pariwisata :
1. merancang pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif wilayah; dan
  2. membangun kemitraan multipihak di bidang pariwisata.
- B. Sub Divisi Telekomunikasi, Media dan Informatika :
1. merancang pengembangan industri media yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif; dan
  2. membangun kemitraan multipihak di bidang industri media.
- C. Sub Divisi Transportasi dan Logistik :
1. merancang pengembangan transportasi yang membuka akses ke seluruh wilayah;
  2. merancang pengembangan jasa dan manajemen logistik; dan
  3. membangun kemitraan multipihak di bidang transportasi dan logistik.
- VIII. Divisi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif :
- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang ekonomi kreatif.
- A. Sub Divisi Usaha Mikro Kecil Menengah :
1. merancang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif wilayah; dan

2. membangun kemitraan multipihak untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.
- B. Sub Divisi Ekonomi Kreatif : 1. merancang pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif; dan  
2. membangun kemitraan multipihak di bidang ekonomi kreatif.
- IX. Divisi Konstruksi dan Properti : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang konstruksi; dan  
b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang properti.
- A. Sub Divisi Properti : 1. merancang pengembangan properti berbasis ekonomi masyarakat; dan  
2. membangun kemitraan multipihak di bidang properti.
- B. Sub Divisi Konstruksi : 1. merancang peningkatan pembangunan di bidang konstruksi yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun swasta; dan  
2. membangun kemitraan multipihak di bidang pembiayaan konstruksi.
- X. Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan : a. merumuskan instrumen kebijakan bidang keuangan, pajak, dan moneter yang mampu mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi Jawa Barat;  
b. merancang penerapan kebijakan insentif dan disinsentif di bidang perpajakan;  
c. membangun kemitraan di bidang keuangan yang dapat meningkatkan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap permodalan;  
d. merumuskan instrumen kebijakan yang mampu mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi Jawa Barat;  
e. merancang ekosistem ekonomi Jawa Barat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing; dan  
f. merancang tata kelola ekonomi Jawa Barat berbasis keunggulan kompetitif wilayah.
- A. Sub Divisi Kajian Ekonomi : 1. merancang kajian ekonomi dalam pemulihan dan transformasi ekonomi; dan  
2. membangun kemitraan multipihak dalam melaksanakan kajian ekonomi.
- B. Sub Divisi Jasa Keuangan : 1. merancang pemulihan ekonomi di bidang jasa keuangan; dan

2. membangun kemitraan multih pihak di bidang jasa keuangan.
- XI. Divisi Komunikasi dan Gerakan :
- a. merumuskan strategi komunikasi program pemulihan ekonomi Jawa Barat; dan
  - b. merumuskan strategi pelibatan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi.
- A. Sub Divisi Komunikasi :
- 1. merancang komunikasi program pemulihan ekonomi; dan
  - 2. membangun kemitraan multipihak di bidang komunikasi.
- B. Sub Divisi Gerakan :
- 1. merancang pelibatan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi; dan
  - 2. membangun kemitraan multipihak dalam upaya pemulihan ekonomi.

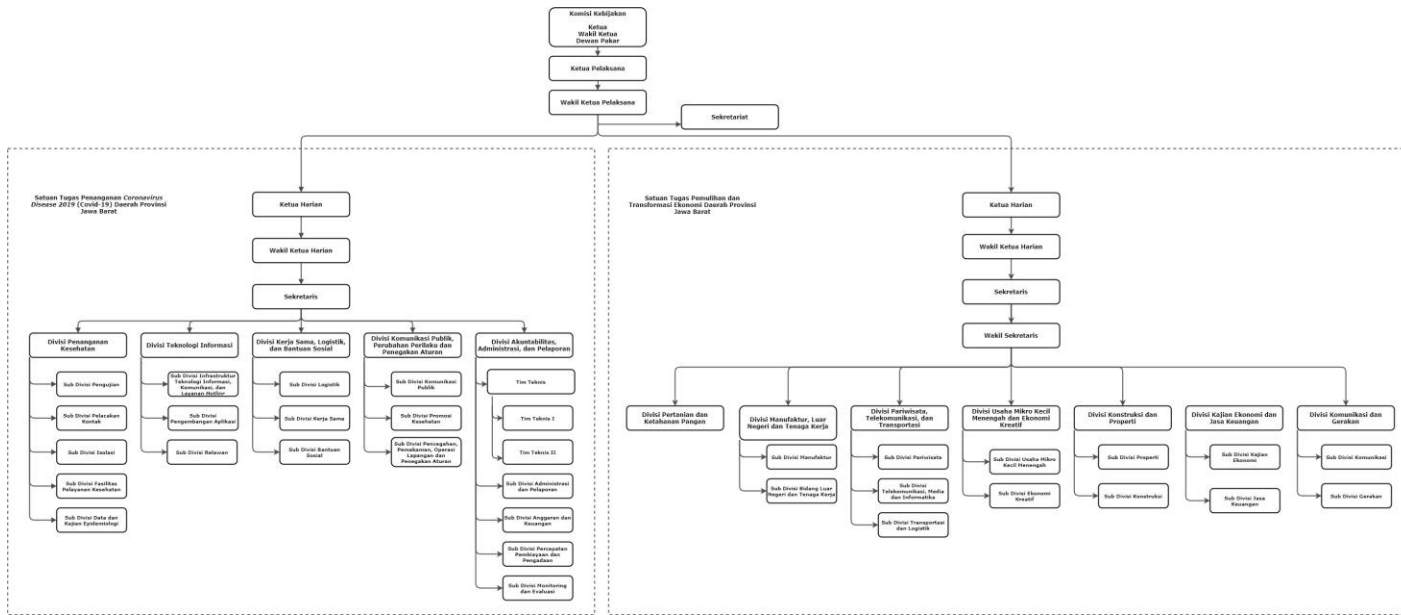
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 475.5/Kep.581-Hukham/2020  
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2020  
 TENTANG : KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN  
 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN  
 PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA  
 BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL